

**PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI APLIKASI e-BMD  
DALAM RANGKA TRANSFORMASI DIGITAL DI KABUPATEN BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Muhammad Rafi Renata

NPP. 32.0545

*Asdaf Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [32.0545@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0545@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Elvira Mulya Nalien, S.IP, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** BMD administration in Bojonegoro Regency is going well and quite effectively through the implementation of the e-BMD application. This is reflected in the improvement of bookkeeping, inventory, and asset reporting indicators which are now carried out in a more orderly, accurate, and timely manner. These three aspects show that the process of recording and managing regional assets is increasingly in accordance with the principles of accountability and transparency. Meanwhile, indicators of data reconciliation between Regional Apparatus Organizations (OPD) and strengthening human resource capacity are still in the improvement stage, considering that data disintegration and dependence on certain operators are still found. Nevertheless, the handling measures taken show the commitment of local governments in continuing to improve the digital-based asset management system.

**Purpose:** This study aims to analyze BMD administration through the e-BMD application in the context of digital transformation in Bojonegoro Regency, East Java Province. **Methods:** This study uses a Descriptive Qualitative Approach, data was obtained through Semi-Structured Interviews, Participatory Observation and documentation. Interviews were conducted with key informants selected using purposive sampling and snowball sampling methods, namely the Head of Agency, Head of Division, Head of Sub-Bid, operator staff, and direct users of the e-BMD application within BPKAD Bojonegoro **Results:** The results of the study show that e-BMD has proven to be quite effective in encouraging the digitalization of regional asset management by being shown through the Bookkeeping Dimension: The e-BMD application has succeeded in improving the accuracy of recording and reduce administrative errors by digitally integrating asset recording processes; Inventory Dimension: The e-BMD application has succeeded in providing more timely and transparent reports, facilitating access to information for quick and appropriate decision-making, and supporting transparency and accountability in regional asset management; and Reporting Dimensions: The e-BMD application has succeeded in providing more timely and transparent reports, facilitating access to information for fast and precise decision-making, and supporting transparency and accountability in regional asset management. **Conclusion:** The Bojonegoro Regency Government has made various efforts such as applying for application customization to the Ministry of Home Affairs, intensive training for operators, and the preparation of internal reconciliation provisions. Thus, e-BMD has proven to be quite effective in encouraging the digitalization of regional asset management.

**Keywords:** Regional Property, Administration, Digital Transformation, e-BMD, Bojonegoro

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penatausahaan BMD di Kabupaten Bojonegoro berlangsung dengan baik dan cukup efektif melalui penerapan aplikasi e-BMD. Hal ini tercermin dari membaiknya indikator pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset yang kini dilakukan secara lebih tertib, akurat, dan tepat waktu. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pengelolaan aset daerah semakin sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sementara itu, indikator rekonsiliasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penguatan kapasitas sumber daya manusia masih berada dalam tahap perbaikan, mengingat masih ditemukan ketidakterpaduan data serta ketergantungan pada operator tertentu. Meskipun demikian, langkah-langkah penanganan yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam terus menyempurnakan sistem pengelolaan aset berbasis digital. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penatausahaan BMD melalui aplikasi e-BMD dalam rangka transformasi digital di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur **Metode:** Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif, data diperoleh melalui Wawancara Semi Terstruktur, Observasi Partisipatif serta dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang dipilih dengan metode purposive sampling dan *snowball sampling*, yakni Kepala Badan, Kabid, Kasubbid, staf operator, hingga pengguna langsung aplikasi e-BMD di lingkungan BPKAD Bojonegoro **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-BMD terbukti cukup efektif dalam mendorong digitalisasi pengelolaan aset daerah dengan ditunjukkan melalui Dimensi Pembukuan: Aplikasi e-BMD telah berhasil meningkatkan akurasi pencatatan dan mengurangi kesalahan administratif dengan mengintegrasikan proses pencatatan aset secara digital; Dimensi Inventarisasi: Aplikasi e-BMD telah berhasil menyediakan laporan yang lebih tepat waktu dan transparan, mempermudah akses informasi untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah; serta Dimensi Pelaporan: Aplikasi e-BMD telah berhasil menyediakan laporan yang lebih tepat waktu dan transparan, mempermudah akses informasi untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. **Kesimpulan:** Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya seperti permohonan kostumisasi aplikasi ke Kemendagri, pelatihan intensif bagi operator serta penyusunan ketentuan rekonsiliasi internal. Dengan demikian, e-BMD terbukti cukup efektif dalam mendorong digitalisasi pengelolaan aset daerah.

**Kata Kunci:** Barang Milik Daerah, Penatausahaan, Transformasi Digital, e-BMD, Bojonegoro

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu unsur penting dalam keuangan daerah adalah Barang Milik Daerah (BMD). Merupakan aset spesifik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah serta dilaporkan sebagai bagian dari kekayaan daerah dalam neraca keuangan pemerintah. Meliputi berbagai jenis aset, termasuk tanah, bangunan, peralatan dan infrastruktur yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lainnya yang sah, seperti hibah dan putusan pengadilan. BMD juga merupakan bentuk kekayaan daerah dan harus dikelola secara optimal (Budiman et al., 2022).

Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sebagaimana diatur dalam "Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah" serta "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah", Barang Milik Daerah (BMD) wajib dicatat, dipantau, dan dikelola secara akurat untuk menjamin efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah (Sa'diyah, 2024). Pencatatan administratif BMD dilakukan dengan tujuan mendukung tata kelola yang baik dan memaksimalkan kontribusi aset ini terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pencatatan ini erat kaitannya dengan penatausahaan.

Penatausahaan BMD merupakan proses administratif yang melibatkan pencatatan dan pelaporan aset sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini meliputi inventarisasi, pembukuan, pelaporan dan rekonsiliasi data barang agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Adapun penatausahaan yang akurat bertujuan untuk memastikan seluruh aset daerah terdata dengan baik sehingga mempermudah pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan aset oleh pemerintah daerah. Selain itu, penatausahaan mendukung transparansi dalam pelaporan pada neraca keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar di Jawa Timur, baik dari segi sumber daya alam maupun aset daerah dan BMD. Hal ini Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah terkaya kedua di Provinsi Jawa Timur. Adapun kabupaten ini memiliki berbagai aset daerah dan BMD yang cukup banyak dan beragam, termasuk tanah, bangunan, dan aset lainnya yang bernilai tinggi (Yulianty, 2020). "Saldo aset Kabupaten Bojonegoro" yang telah diaudit hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp15,4 triliun (Halim, 2021). Meskipun nilai aset tersebut mencerminkan potensi ekonomi yang signifikan, pengelolaan "Barang Milik Daerah (BMD)" di Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah kebutuhan akan sistem penatausahaan yang akurat dan transparan. Salah satunya adalah kebutuhan akan sistem penatausahaan yang akurat dan transparan. Data mutasi aset menjadi salah satu alat penting untuk mengevaluasi dinamika pengelolaan aset daerah serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut tabel rekapitulasi BMD Kabupaten Bojonegoro 2021-2023

Inovasi ini dirancang untuk mempermudah pencatatan, pemantauan dan pengelolaan aset secara digital. Sebelumnya telah dilakukan migrasi sistem pengelolaan aset dari aplikasi lama, yaitu SIMDA, ke aplikasi e-BMD sebagai bagian dari upaya meningkatkan penatausahaan BMD. Aplikasi eBMD diharapkan mampu memberikan solusi atas masalah tersebut dengan menyediakan sistem pencatatan yang lebih modern, akurat dan terintegrasi sehingga potensi aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Transformasi digital tidak sekadar adopsi teknologi, tetapi juga membutuhkan restrukturisasi organisasi serta penyesuaian indikator kinerja, yang sangat relevan dalam konteks implementasi aplikasi e-BMD di pemerintah daerah (Verhoef et al., 2021)

Guna menjawab tantangan pengelolaan BMD yang kompleks khususnya pada tahapan penatausahaan dan untuk mengatasi beberapa kendala diatas maka Kabupaten Bojonegoro melaksanakan amanat dari Kementerian Dalam Negeri untuk penggunaan aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD) pada tahun 2024. Adapun leading sector untuk pengembangan aplikasi ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro. Landasan hukum e-BMD di Kabupaten Bojonegoro mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2024 yang mencakup pedoman pengelolaan BMD yang telah disesuaikan dengan peraturan terbaru mengenai pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah penatausahaan BMD di Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih efektif setelah menggunakan aplikasi e-BMD dan berbagai permasalahan yang sementara peneliti dapatkan diatas, dapat teratasi. Seperti ketidaksesuaian antara pencatatan dan kondisi riil, pencatatan ganda pada aset rehabilitasi serta

data barang yang tidak lengkap menunjukkan perlunya inovasi dalam pengelolaan BMD. Oleh sebab beragamnya BMD di Kabupaten Bojonegoro maka peneliti batasi pada aset tetap agar lebih mendalam.

Aplikasi e-BMD memiliki potensi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pencatatan dengan fitur-fitur seperti penginputan data secara detail, pelacakan lokasi barang dan pembaruan informasi. Digitalisasi dalam sektor publik memerlukan kerangka tematik yang evolutif agar implementasi sistem seperti e-BMD dapat sejalan dengan tujuan manajemen modern berbasis teknologi (Kraus et al., 2021). Pengelolaan khususnya penatausahaan BMD diharapkan menjadi lebih efektif dan dapat meningkatkan keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi ini. Oleh sebab itu peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi e-BMD dalam Rangka Transformasi Digital di Kabupaten Bojonegoro”.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kesenjangan masalah (gap penelitian) yang diangkat dalam kajian ini terletak pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Bojonegoro. Ketidaksiharian antara pencatatan dan kondisi riil di lapangan, adanya pencatatan ganda pada aset rehabilitasi, serta data barang yang tidak lengkap atau tidak mutakhir, semuanya menyoroti urgensi inovasi dalam sistem pengelolaan BMD. Mengingat beragamnya jenis BMD yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai dari tanah dan bangunan, kendaraan, hingga peralatan kantor tantangan ini tidak hanya kompleks secara administratif, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian finansial dan ketidakefisienan dalam pelayanan publik jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi inovatif yang berkelanjutan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya penting untuk menjadi referensi dan acuan dalam mengembangkan penelitian terkait tema yang diangkat. Menjadi dasar untuk melihat sejauh mana penelitian terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dan aplikasi digital telah dilakukan serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Penelitian pertama dilakukan oleh (Permatasari & Hastuti, 2020) dari Politeknik Negeri Bandung pada tahun 2020, yang berjudul Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Penelitian ini berfokus pada evaluasi aspek penatausahaan aset tetap dalam mendukung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis hubungan kausal untuk mengetahui kontribusi penatausahaan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian kedua oleh (Silvi Fitria et al., 2022) dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati meneliti Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung. Penelitian ini juga memakai pendekatan kuantitatif dan menjelaskan hubungan asosiatif antara aspek penatausahaan BMD dan kualitas laporan keuangan, khususnya di badan perencanaan dan pengembangan daerah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Utami, 2020) dari Universitas Tridnanti Palembang tahun 2020, berjudul Analisis Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda-BMD). Fokus utama dari penelitian ini adalah menilai efektivitas sistem Simda-BMD dalam menunjang proses penatausahaan aset tetap. Pendekatan kuantitatif juga digunakan di sini, dengan penekanan pada sejauh mana sistem yang telah diterapkan mampu mendukung pengelolaan aset secara efisien.

Penelitian keempat berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang ditulis oleh (Martini et al., 2023). Penelitian ini mengangkat tema Peran Penatausahaan Aset Tetap untuk

Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang. Dalam kajiannya, para peneliti mengevaluasi hubungan antara penatausahaan aset dengan peningkatan akuntabilitas publik. Metode yang digunakan cenderung kuantitatif, dengan tujuan untuk mengukur dampak langsung penatausahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Penelitian kelima dilakukan oleh (Damanik et al., 2022) dari Universitas Lambung Mangkurat dengan judul Pengaruh Penatausahaan Aset dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Kabupaten Barito Utara. Penelitian ini memadukan dua variabel utama: penatausahaan aset dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dinilai berdampak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian mutakhir yang menekankan pada teknologi baru seperti e-BMD, penelitian ini masih fokus pada penggunaan teknologi secara umum dan pengaruhnya terhadap ketepatan laporan (Prabowo et al., 2021). Temuan menunjukkan bahwa transformasi digital, termasuk dalam sistem manajemen aset seperti e-BMD, berdampak signifikan terhadap peningkatan inovasi dan efisiensi organisasi daerah (Paulin, 2022).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menghadirkan beberapa kebaruan signifikan yang membedakannya dari studi-studi terdahulu, terutama dalam tiga aspek kunci: kerangka teori, pendekatan metodologi, dan potensi pemanfaatan teknologi dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Secara teoretis, penelitian ini mengadopsi teori "penatausahaan" yang digagas oleh (Suwanda, 2013). Teori ini secara spesifik mengidentifikasi tiga pilar utama dalam pengelolaan aset: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Dengan menerapkan kerangka ini, analisis penatausahaan aset dapat dilakukan secara lebih sistematis dan mendalam, memungkinkan identifikasi celah dan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Hal ini berbeda dengan kecenderungan penelitian sebelumnya yang mungkin hanya berfokus pada salah satu aspek atau menggunakan kerangka teori yang lebih umum. Dari sisi metodologi, penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pilihan ini merupakan sebuah kebaruan signifikan dibandingkan dengan banyak penelitian terdahulu yang cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi hubungan kausal antar variabel. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara lebih mendalam, memahami konteks, persepsi, dan pengalaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penatausahaan BMD. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih holistik dan kaya akan detail, yang sulit dicapai melalui analisis statistik semata.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui aplikasi e-BMD dalam rangka transformasi digital di Kabupaten Bojonegoro. Lebih lanjut, studi ini juga berupaya untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi selama implementasi penatausahaan BMD melalui aplikasi tersebut, serta mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami praktik penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui pemanfaatan aplikasi e-BMD di Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan desain penelitian terhadap dinamika sosial dan konteks lapangan (Simangunsong, 2017). Fokus penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai proses, tantangan, serta dampak implementasi sistem digital dalam pengelolaan aset daerah. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme, yakni

memandang bahwa realitas sosial dibentuk oleh pengalaman dan interpretasi individu terhadap peristiwa yang mereka alami (Nurdin & Hartati, 2019). Pendekatan ini relevan dalam menggali makna yang dikonstruksi oleh para pengelola aset dan pemangku kepentingan terhadap penggunaan aplikasi e-BMD sebagai inovasi dalam sistem penatausahaan BMD. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif moderat, dan dokumentasi. Teknik triangulasi diterapkan untuk meningkatkan validitas data melalui perbandingan dari berbagai sumber (Ardieansyah et al., 2023). Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang dipilih dengan metode purposive sampling dan snowball sampling, yakni individu yang memiliki relevansi tinggi terhadap penelitian seperti Kepala Badan, Kabid, Kasubbid, staf operator, hingga pengguna langsung aplikasi e-BMD di lingkungan BPKAD Bojonegoro.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara langsung dan observasi; serta data sekunder, berupa laporan keuangan, manual aplikasi, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, objek penelitian mengacu pada konsep *Place, Person, dan Paper* sebagaimana dikembangkan oleh Spradley (Sugiyono, 2019), untuk memastikan cakupan data yang holistik dan kontekstual. Teknik analisis data dilakukan secara tematik melalui empat tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta proses iteratif (Creswell, 2019). Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dalam pelaksanaan e-BMD serta mengevaluasi keberhasilan implementasinya berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang merupakan instansi pelaksana utama dalam penatausahaan BMD melalui aplikasi e-BMD. Lokasi ini dipilih berdasarkan relevansi langsung terhadap fokus dan tujuan penelitian. Jadwal pelaksanaan penelitian berlangsung sesuai kalender akademik tahun 2024/2025 yakni dari 6 Januari- 28 Januari 2025.

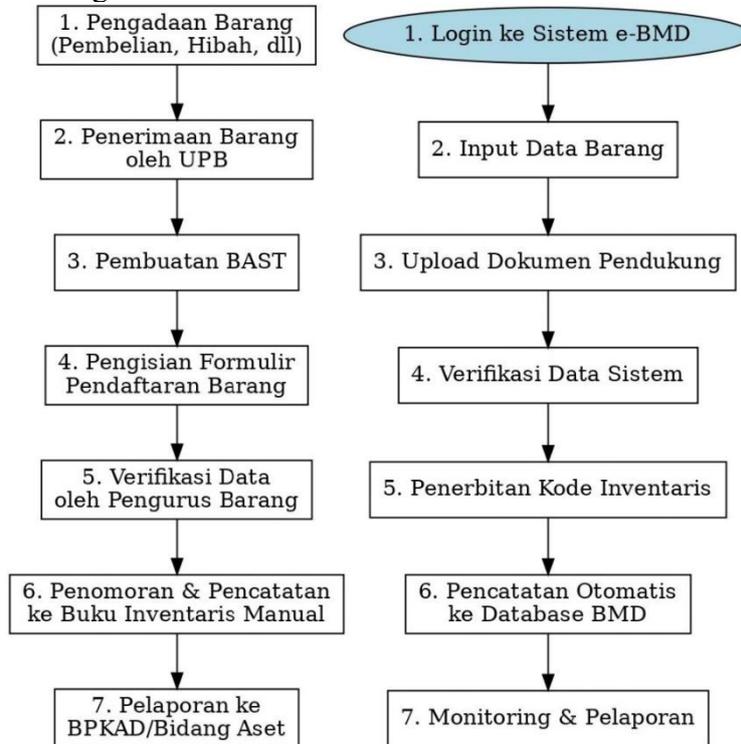
### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan aplikasi e-BMD di Kabupaten Bojonegoro merupakan langkah konkret dalam upaya meningkatkan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintahan daerah. Aplikasi ini memungkinkan proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan aset daerah dilakukan secara elektronik, terintegrasi, dan real time, sehingga meminimalisasi potensi kesalahan manusia serta mempercepat proses administrasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait, pemanfaatan e-BMD telah memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMD, khususnya dalam aspek pendataan, pemutakhiran informasi, serta pelaporan kepada instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui e-BMD tidak hanya mendukung efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

#### **3.1. Pembukuan**

Indikator pembukuan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui aplikasi e-BMD bertujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan dan mengurangi kesalahan administratif. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses pencatatan aset secara digital, sehingga memudahkan verifikasi, pengolahan, serta penyimpanan data (Suwanda, 2013). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Andi Panca Wardana, SE, AK (17 Januari 2025), dijelaskan bahwa meskipun aplikasi e-BMD sudah digunakan dalam proses pembukuan, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti integrasi data dan pembaruan informasi aset yang belum optimal. Meski begitu, aplikasi ini dinilai membawa arah positif menuju transparansi dan akuntabilitas tata kelola aset.

Dalam proses pendaftaran aset, sistem konvensional sebelumnya melibatkan tahapan manual dari identifikasi, pencatatan, hingga pelaporan, yang cenderung lambat dan berisiko tinggi terjadi kesalahan. Namun dengan e-BMD, OPD dapat langsung menginput data secara digital dan sistem akan melakukan validasi otomatis. Data yang masuk diverifikasi ulang oleh BPKAD sebelum dinyatakan resmi. Adapun alur pendaftaran antara sistem manual dan e-BMD dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Diolah Peneliti, 2025

**Gambar 1. 1**  
**Alur Pendaftaran Manual dan e-BUMD**

Gambar 1.1 menunjukkan alur pendaftaran. Pada sistem konvensional (manual), alur pendaftaran BMD dilakukan secara berjenjang, dimulai dari identifikasi barang oleh masing-masing SKPD, pencatatan dalam buku inventaris barang, pembuatan berita acara serah terima, hingga pelaporan ke BPKAD sebagai instansi pengelola aset daerah. Namun, sejak diterapkannya aplikasi e-BMD, setiap OPD dapat langsung menginput data aset secara digital, di mana sistem melakukan validasi otomatis terhadap kelengkapan dan keabsahan data. Setelah itu, data diverifikasi oleh BPKAD sebelum dicatat secara resmi. Keunggulan dari sistem e-BMD adalah kemampuannya memberikan informasi secara real-time, meningkatkan akurasi data, serta mencatat nilai aset beserta penyusutannya.

Pada praktiknya, setiap OPD bertanggung jawab melakukan identifikasi fisik dan administratif atas aset mereka sebelum diinput ke sistem. Proses ini mencakup pencocokan data dengan dokumen pendukung seperti SK, BAST, atau bukti pengadaan. Menurut Andi Panca Wardana, pendaftaran aset kerap disalahartikan sebagai proses pengadaan, padahal proses ini merupakan tahap awal penatausahaan yang melibatkan verifikasi legalitas dan kelengkapan data barang. Berikut data pendaftaran aset setelah menggunakan e-BMD:

**Tabel 1. 1**  
**Pendaftaran BMD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024**

Kode Barang			Nama Barang	Jumlah BMD	Saldo Akhir (Rp.)	Status
1	2		ASET TETAP	4.119.021	7.737.009.523.707,08	Terdaftar
1	3					
1	3	2	Tanah	1.462	2.321.030.534.340,58	Terdaftar
1	3	1				
1	3	2	Peralatan dan Mesin	185.417	1.386.818.275.968,57	Terdaftar
1	3	2				
1	3	3	Gedung dan Bangunan	7.104	2.918.211.275.672,30	Terdaftar
1	3	3				
1	3	4	Jalan, Jaringan Dan	18.017	1.005.838.472.085,37	Terdaftar
1	3	4	Irigasi			
1	3	5	Aset Tetap Lainnya	3.906.374	105.283.133.640,25	Terdaftar
1	3	5				
1	3	6	Konstruksi dalam	194.647	306.062.239.784,23	Terdaftar
1	3	6	Pengerjaan			
1	3	7	Akumulasi Penyusutan	-	(7.745.017.168.757,99)	Terdaftar
1	3	7				

Sumber : BPKAD Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan tabel di atas, menampilkan data mengenai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah terdaftar dalam sistem administrasi pemerintah. Aset tetap yang tercatat mencakup berbagai kategori seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan, serta aset lainnya. Seluruh aset dalam tabel berstatus terdaftar yang menegaskan bahwa aset-aset ini telah dicatat secara resmi dalam sistem.

Meski telah banyak aset terdaftar, tantangan masih ada, seperti rendahnya pemahaman teknis pengguna serta ketidaksesuaian data manual dan elektronik. Namun secara umum, penggunaan e-BMD mempercepat proses pendaftaran dan membantu pengambilan keputusan serta pelaporan secara lebih transparan dan efisien. Pada aspek pencatatan, e-BMD sangat membantu dalam memastikan informasi aset tercatat secara akurat, sistematis, dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting dalam mendukung prinsip tata kelola yang baik. Dibandingkan metode manual, e-BMD unggul dalam kecepatan, ketelitian, aksesibilitas data, serta efisiensi biaya (Sinurat & Panjaitan, 2017).

Berdasarkan observasi, pencatatan dimulai setelah OPD menerima barang, lalu diverifikasi secara fisik dan administratif. Data diinput lengkap termasuk kode identifikasi atau QR code, memudahkan pelacakan. Validasi berkala memastikan kesesuaian kondisi lapangan dengan data digital. Per April 2025, pencatatan meningkat menjadi 80% seiring upaya percepatan migrasi data. Kepala Bidang Aset, Andi Panca Wardana menyatakan bahwa sistem e-BMD mendorong efisiensi dan transparansi, serta mendukung prinsip “catat baru bayar”. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Sub-Bidang M. Syaifuddin dan staf administrasi Hanifa Dwi Safitri, yang mengapresiasi fitur QR code dan integrasi data yang memudahkan

pelacakan dan pemeliharaan barang. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pencatatan BMD kini dapat dilakukan secara real-time, memudahkan kontrol, pelaporan, hingga proses audit. Sistem ini terbukti meningkatkan validitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah di Bojonegoro.

### **3.2. Inventarisasi**

Inventarisasi merupakan aspek krusial dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang bertujuan untuk mempercepat pendataan dan memastikan keakuratan data barang yang tercatat melalui penerapan aplikasi e-BMD. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan yang terintegrasi dan lebih efisien, sehingga mempermudah pengelolaan aset dengan menyediakan informasi yang lebih transparan dan dapat diakses kapan saja oleh pihak yang berwenang. Hal ini secara signifikan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD.

Inventarisasi fisik adalah proses inti yang melibatkan penghitungan, pengukuran, dan pencatatan langsung keberadaan serta kondisi Barang Milik Daerah (BMD) di lapangan. Prosedur ini esensial untuk mencocokkan kondisi fisik aset yang sebenarnya dengan data yang telah dimasukkan ke dalam sistem administrasi. Regulasi terkait inventarisasi BMD diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Secara tradisional, inventarisasi fisik dilakukan secara manual, di mana tim inventarisasi akan mendatangi langsung lokasi barang atau aset, melakukan penghitungan dan pengukuran secara manual, serta mencatat hasilnya menggunakan lembar formulir atau daftar inventarisasi. Namun, dengan adopsi e-BMD, proses inventarisasi dilakukan secara lebih efektif dibandingkan cara manual.

Proses inventarisasi melalui e-BMD diawali dengan pencatatan awal barang ke dalam sistem, meliputi jenis, jumlah, kondisi, dan lokasi barang. Setelah itu, dilakukan verifikasi fisik oleh petugas untuk memastikan kesesuaian data yang tercatat dengan kondisi barang di lapangan. Dokumen pendukung seperti faktur pembelian, Berita Acara Serah Terima (BAST), atau sertifikat tanah juga diunggah ke dalam sistem untuk melengkapi data dan memastikan legalitas barang. Setelah semua data diverifikasi dan lengkap, status barang diperbarui dalam e-BMD agar tercatat secara resmi dan terintegrasi dalam pengelolaan aset daerah. Proses pemeriksaan fisik barang dilakukan untuk memastikan kondisi barang sesuai dengan catatan dan hasilnya langsung dicatat ke dalam e-BMD secara tepat waktu. Terakhir, laporan hasil inventarisasi disusun dan disampaikan kepada pihak berwenang untuk tindak lanjut, seperti perbaikan atau penghapusan barang yang tidak layak.

Aplikasi e-BMD juga memungkinkan pengguna untuk mencetak Kartu Inventarisasi Barang (KIB) secara langsung. KIB ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang memuat data lengkap mengenai barang, seperti jenis, kode identifikasi, kondisi fisik, lokasi, nilai, serta status hukum atau dokumen pendukung yang relevan. KIB yang dicetak melalui e-BMD dapat digunakan sebagai acuan dalam audit, pemeriksaan fisik, dan pengawasan aset daerah, sehingga memastikan semua BMD tercatat dengan akurat dan sah. Proses ini mendukung pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan pengawasan aset daerah.

**Tabel 1. 2**  
**Data Inventarisasi Fisik BMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024**

Kode Barang			Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp.)
1	3	1	Tanah	2.856	m <sup>2</sup>	556.400.000
1	3	2	Peralatan dan Mesin	754	Unit	10.500.470.912
1	3	3	Gedung dan Bangunan	8	m <sup>2</sup>	5.432.531.278,53
1	3	4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	9	m	231.873.700
1	3	5	Aset Tetap Lainnya	201	Unit	2.177.091.495
1	5	3	Aset Tak Berwujud	32	Paket	641.375.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro

Tabel 1.2 ini menunjukkan rekap hasil akhir inventarisasi fisik yang mendapatkan informasi langsung mengenai jumlah, satuan, dan nilai perolehan masing-masing jenis BMD. Penting untuk dicatat bahwa dalam inventarisasi fisik BMD melalui e-BMD, pencocokan data barang yang tercatat dalam sistem dengan kondisi di lapangan, termasuk jenis, jumlah, dan lokasi, menjadi sangat krusial. Selain itu, setiap barang diharapkan memiliki QR code yang dapat dipindai untuk mempercepat proses pencatatan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Bojonegoro, Bapak Andi Panca Wardana pada tanggal 20 Januari 2025, dijelaskan bahwa inventarisasi aset barang milik daerah di Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan secara rutin dan terstruktur. BPKAD bertanggung jawab memastikan setiap BMD yang diterima instansi pemerintah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tercatat dengan baik dalam e-BMD. Beliau juga mengusahakan agar pelaporan barang mulai tahun 2025 diadakan setiap bulan untuk meningkatkan kualitas pelaporan aset daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua BMD selalu tercatat dengan baik dan laporan yang disampaikan lebih terkini dan akurat, mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih optimal.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset, Bapak M. Syaifuddin, S.Sos., menambahkan bahwa persiapan yang diperlukan dalam penatausahaan barang meliputi kelengkapan dokumen terkait barang yang akan diinventarisasi, seperti faktur pembelian, berita acara serah terima (BAST), serta dokumen pendukung lainnya. Pencatatan informasi penting tentang barang, seperti jenis, jumlah, kondisi, dan lokasi, juga sangat diperlukan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap barang dan dokumen terkait untuk memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi fisik barang di lapangan, sehingga proses penatausahaan dapat berjalan akurat dan sesuai prosedur. Hasil wawancara ini menekankan peran besar persiapan data dalam inventarisasi aset fisik untuk mencegah penyimpanan data dalam laporan aset.

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses inventarisasi fisik BMD melalui e-BMD di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berjalan lebih efisien dan transparan. Pencocokan data barang dengan kondisi di lapangan dilakukan menggunakan QR code untuk mempercepat pencatatan. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterlambatan pemindaian QR code dan ketidaksesuaian data akibat kesalahan input. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian serta pelatihan bagi petugas agar inventarisasi aset daerah semakin akurat dan optimal.

Meskipun demikian, penerapan e-BMD telah mempercepat proses, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah, sehingga inventarisasi fisik melalui e-BMD ini dapat dikatakan efektif.

### **Inventarisasi Yuridis**

Selain mencatat informasi fisik dan lokasi aset, e-BMD juga memungkinkan pencatatan aspek yuridis atau status hukum dari barang tersebut. Inventarisasi yuridis adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis data terkait aspek hukum atau legalitas dari suatu barang atau aset. Proses ini bertujuan untuk memastikan kejelasan status kepemilikan, legalitas perolehan, dan dokumen-dokumen pendukung yang sah. Regulasi terkait inventarisasi yuridis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Inventarisasi yuridis mempermudah pihak berwenang untuk memverifikasi status kepemilikan dan keabsahan dokumen secara cepat dan akurat. Dengan integrasi dokumen yuridis dalam sistem, risiko kesalahan pencatatan dapat diminimalkan sekaligus mengurangi potensi sengketa hukum terkait kepemilikan aset daerah. Proses ini memastikan bahwa seluruh aset tercatat dengan legalitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara manual, proses inventarisasi yuridis melibatkan pemeriksaan dokumen seperti sertifikat kepemilikan dan akta jual beli. Namun, cara ini rentan terhadap kehilangan dokumen, memakan waktu, dan sulit dalam akses serta pelacakan data. Sebaliknya, penggunaan e-BMD memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan dokumen yuridis secara digital, sehingga lebih aman, mudah diakses, dan menghemat biaya operasional seperti kertas dan ruang penyimpanan fisik. Proses ini menekankan pentingnya kelengkapan dokumen legal seperti sertifikat tanah, surat kepemilikan, dan perjanjian, yang dapat diunggah dan diintegrasikan secara digital melalui e-BMD untuk memudahkan verifikasi dan pencatatan.

Wawancara dengan Bapak Andi Panca Wardana pada tanggal 20 Januari 2025, mengenai inventarisasi yuridis aset BMD melalui e-BMD, beliau menekankan bahwa kelengkapan dokumen legal seperti sertifikat tanah, surat kepemilikan, dan dokumen perjanjian adalah dasar penting dalam penatausahaan dan pencatatan aset. Melalui e-BMD, semua dokumen yuridis dapat diunggah dan terintegrasi dalam sistem, memudahkan verifikasi dan pencatatan secara digital. Bapak M. Syaifuddin, S.Sos., juga menambahkan bahwa pencatatan data barang tidak hanya terbatas pada informasi fisik dan lokasi, tetapi juga melibatkan aspek legalitas atau status hukum, memungkinkan verifikasi status kepemilikan dan keabsahan dokumen secara lebih cepat dan akurat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, proses inventarisasi yuridis di Kabupaten Bojonegoro melalui e-BMD telah mempermudah verifikasi dan pencatatan dokumen legal secara digital. Dokumen seperti sertifikat tanah dan surat kepemilikan diunggah ke sistem untuk memastikan keterpaduan data. Namun, belum semua aset tercatat lengkap dalam aspek yuridis, sehingga indikator ini dinilai belum efektif

### **3.3. Pelaporan**

Indikator pelaporan bertujuan untuk menyediakan laporan yang tepat waktu dan transparan kepada pihak berkepentingan. Melalui aplikasi e-BMD, data aset selalu diperbarui dan akurat, serta mempermudah akses informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang

lebih cepat dan tepat. Selain itu, aplikasi e-BMD mendukung transparansi dalam pengelolaan aset, mengurangi potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian data, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan barang milik daerah.

Penyusunan laporan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data atau informasi secara sistematis dalam bentuk tertulis dan lisan. Regulasi yang mengatur penyusunan laporan BMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Secara manual, penyusunan laporan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber dan pengolahan data menggunakan kertas dan pena, yang dapat memakan waktu dan tenaga besar, serta sulit diakses dan dilacak. Aplikasi e-BMD memberikan kemudahan dalam menyusun laporan penatausahaan barang dengan menyediakan platform digital yang memungkinkan verifikasi data secara berkala. Dengan e-BMD, proses penyusunan laporan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi, pelaporan aset BMD melalui e-BMD di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun masih menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya. Idealnya, pelaporan dilakukan secara *update* dan terintegrasi dengan data yang diperbarui serta divalidasi secara berkala untuk memastikan akurasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih ditemukan keterlambatan dalam input data, ketidaksesuaian pencatatan dengan kondisi fisik barang, serta kendala dalam pembaruan laporan secara rutin. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami kesulitan dalam mengakses dan memperbarui data tepat waktu, sementara tindak lanjut terhadap laporan, seperti perbaikan atau penghapusan aset, masih terkendala koordinasi antarinstansi.

Menurut Bapak Robert Tri Yulianto, admin pengurus barang e-BMD, dalam wawancara, penyusunan laporan dengan e-BMD menekankan bahwa data aset harus selalu diperbarui dan divalidasi secara berkala untuk memastikan akurasi laporan. Fitur pencetakan laporan langsung mempermudah pengiriman laporan yang lebih cepat dan tepat waktu kepada pihak berkepentingan, meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan aset daerah. Kode program 5.02.02 atau program pengelolaan keuangan daerah sesuai DPA/dokumen pelaksanaan anggaran mendukung kelancaran program ini dengan menyediakan sarana untuk mencatat dan memantau pengadaan barang yang dilakukan oleh setiap OPD. Setelah pengadaan, data barang dicatat dalam e-BMD, memungkinkan pemantauan lebih lanjut terkait penggunaan, pemeliharaan, dan pelaporan. Meskipun e-BMD mendukung pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien, optimalisasi validasi data masih diperlukan agar laporan yang dihasilkan semakin akurat dan dapat diandalkan.

Proses penyusunan laporan melalui e-BMD memerlukan rentang waktu yang bervariasi, berkisar antara 2 hingga 6 minggu, tergantung pada kompleksitas dan kondisi di lapangan. Faktor-faktor seperti jumlah aset, kelengkapan data, dan kesiapan sumber daya manusia memengaruhi durasi ini. Jika jumlah aset sedikit dan dokumen pendukung lengkap, laporan dapat diselesaikan dalam 3 hingga 7 hari. Namun, untuk aset berjumlah besar yang tersebar di berbagai OPD, prosesnya bisa memakan waktu 2 hingga 4 minggu. Selain itu, jika ditemukan ketidaksesuaian antara data sistem dan kondisi aset di lapangan, verifikasi dan validasi ulang dapat menambah durasi laporan hingga 1-2 minggu. Dengan demikian, secara keseluruhan indikator ini dinilai belum efektif.

## **Rekapitulasi Laporan**

Rekapitulasi laporan adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai laporan menjadi satu laporan ringkas yang memberikan gambaran keseluruhan. Regulasi yang mengatur penyusunan laporan BMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Rekapitulasi laporan manual melibatkan pembacaan dan pencatatan data dari berbagai laporan serta pengolahan data yang seringkali memakan waktu dan rentan kesalahan, serta memiliki keterbatasan dalam transparansi dan akuntabilitas.

Berbeda dengan cara manual, tujuan utama rekapitulasi menggunakan e-BMD adalah untuk memantau pengelolaan aset daerah secara menyeluruh, mengidentifikasi aset yang memerlukan pembaruan atau perbaikan data, serta memastikan seluruh aset tercatat akurat dan lengkap dalam sistem. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Bapak Andi Panca Wardana, menjelaskan bahwa proses rekapitulasi laporan dari penggunaan e-BMD dimulai dengan pengumpulan data aset yang telah tercatat dalam sistem oleh setiap OPD. Data tersebut direkap secara berkala untuk memastikan semua barang terinventarisasi dengan benar dan sesuai kondisi di lapangan. Rekapitulasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan dari setiap OPD, kemudian diverifikasi dan dikonsolidasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Proses ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan keakuratan data aset serta mempermudah pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Pencatatan mutasi Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Bojonegoro pada Semester I Tahun 2024 telah dilakukan secara sistematis melalui e-BMD. Proses ini mencakup pencatatan aset tetap, aset lainnya, serta akumulasi penyusutan aset. Beberapa kategori aset mengalami peningkatan nilai akibat penambahan aset baru, seperti tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi. Namun, terdapat juga aset yang mengalami pengurangan akibat penyusutan atau pelepasan aset tertentu, seperti peralatan dan mesin. Selain itu, akumulasi penyusutan aset juga mengalami perubahan, menunjukkan adanya proses peremajaan atau penghapusan aset yang tidak layak.

Meskipun e-BMD sudah digunakan untuk pencatatan aset dan pelaporan, proses rekapitulasi laporan masih dilakukan secara manual oleh pihak terkait, seperti diungkapkan oleh Bapak Gilang Pratomo Wibowo, Staff Operasional e-BMD, pada wawancara tanggal 20 Januari 2025. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa tahap yang memerlukan verifikasi dan konsolidasi data dari berbagai OPD sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Meskipun e-BMD mempermudah pencatatan dan pelaporan, proses manual ini masih diperlukan untuk memastikan akurasi data yang direkapitulasi. Harapannya, di masa depan, proses rekapitulasi dapat sepenuhnya terintegrasikan dalam e-BMD untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Mengingat kendala-kendala ini, indikator rekapitulasi laporan dinilai belum efektif.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini mengkaji penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Bojonegoro melalui aplikasi e-BMD, berfokus pada aspek pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penanganannya. Temuan ini menghadirkan perbandingan menarik dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik yang memperkuat maupun menunjukkan perbedaan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembukuan BMD di Kabupaten Bojonegoro telah menggunakan aplikasi e-BMD, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Ada kendala dalam validasi data aset yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, yang masih memerlukan proses manual dan koordinasi antar instansi. Sama halnya dengan temuan penelitian Ayu Dwi Permatasari dan Hastuti (2020) mengenai evaluasi penatausahaan aset tetap, yang mengindikasikan bahwa meskipun sistem pencatatan sudah ada, tantangan dalam memvalidasi data dan memastikan kelengkapan dokumen masih menjadi hambatan dalam pencapaian opini WTP. Artinya, integrasi sistem digital saja tidak cukup tanpa didukung oleh prosedur validasi yang ketat dan koordinasi yang baik antar pihak (Romarina et al., 2025).

Dalam aspek inventarisasi, penelitian ini menemukan bahwa inventarisasi fisik BMD di Bojonegoro melalui e-BMD telah berjalan lebih efisien dan transparan, terutama dengan penggunaan QR code untuk mempercepat pencatatan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan pemindaian QR code dan ketidaksesuaian data akibat kesalahan input. Di sisi lain, inventarisasi yuridis masih menunjukkan indikator belum efektif karena data koordinat aset (polygon) baru tercatat 32,42% dan 30,85% sertifikat tanah belum tercatat.

Temuan ini memperkuat temuan penelitian Rizki Utami (2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem manajemen aset mampu meningkatkan efisiensi. Namun, berbeda dengan penelitian Utami yang mungkin lebih fokus pada efisiensi umum, temuan kami secara spesifik menyoroti bahwa meskipun e-BMD meningkatkan efisiensi, masalah data akurasi dan kelengkapan dokumen legal masih menjadi pekerjaan rumah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Eko Bastian Damanik dkk. (2022) yang memadukan penatausahaan aset dan pemanfaatan teknologi informasi, namun temuan kami menunjukkan bahwa meskipun teknologi sudah dimanfaatkan (e-BMD), tantangan dalam kelengkapan data yuridis masih menjadi isu krusial. Artinya, pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya mengatasi masalah validitas dan kelengkapan data legal, khususnya untuk aset yang belum memiliki status hukum yang jelas.

Terkait pelaporan, penelitian ini menemukan bahwa pelaporan aset BMD melalui e-BMD telah meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, masih ada kendala seperti keterlambatan input data, ketidaksesuaian pencatatan dengan kondisi fisik, dan masalah pembaruan laporan secara rutin. Bahkan, proses rekapitulasi laporan masih dilakukan secara manual oleh pihak terkait (Wawancara dengan Bapak Gilang Pratomo Wibowo, Staff Operasional e-BMD, 20 Januari 2025).

Temuan ini senada dengan penelitian Silvi Fitria dkk. (2021) yang meneliti pengaruh penatausahaan BMD terhadap kualitas laporan. Sama halnya dengan penelitian tersebut, temuan kami menunjukkan bahwa meskipun sistem digital diterapkan, kualitas pelaporan masih dapat terpengaruh oleh faktor-faktor operasional seperti ketepatan waktu input data. Berbeda dengan penelitian Rita Martini dkk. (2020) yang mengevaluasi hubungan antara penatausahaan aset dengan peningkatan akuntabilitas publik, temuan kami menunjukkan bahwa meskipun e-BMD mendukung transparansi dan akuntabilitas, masalah pada tahap rekapitulasi manual dapat mengurangi efektivitas pelaporan secara keseluruhan. Hal ini menyiratkan bahwa adanya teknologi canggih tidak serta merta menjamin akuntabilitas sempurna jika masih ada celah pada proses manual.

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat pandangan (Paulin, 2022) bahwa transformasi digital berdampak signifikan terhadap peningkatan inovasi dan efisiensi organisasi daerah. Namun, temuan kami juga menyoroti bahwa efektivitas penuh dari transformasi digital, khususnya dalam pengelolaan BMD, masih sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, ketelitian dalam input data, dan integrasi menyeluruh dari setiap tahapan penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan) tanpa meninggalkan celah proses manual yang rentan kesalahan atau keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa

inovasi teknologi harus diiringi dengan perbaikan prosedur dan peningkatan kualitas SDM untuk mencapai tata kelola BMD yang optimal.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Perbedaan mendasar antara SIMDA-BMD dan e-BMD terletak pada pengembangannya. SIMDA-BMD merupakan sistem yang dikembangkan oleh BPKP, sedangkan e-BMD adalah sistem yang dirancang oleh Kementerian untuk memfasilitasi pengelolaan barang milik daerah secara elektronik. Adanya peralihan ini, diharapkan pengelolaan aset daerah menjadi lebih terintegrasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan proses pendataan, verifikasi, dan pelaporan aset.

Dilihat dari faktor penghambat dan upaya penatausahaan melalui e-BMD dapat diuraikan sebagai berikut. Kendala dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Bojonegoro, meskipun telah memanfaatkan aplikasi e-BMD, masih menjadi perhatian utama. Hal ini terungkap dari wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Bojonegoro, Bapak Andi Panca Wardana, S.E., AK., dan Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset, Bapak M. Syaifuddin, S.Sos. Salah satu kendala utama adalah proses rekonsiliasi BMD yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seringkali tidak lengkap, yang berimplikasi pada ketidakakuratan data aset dan menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, terdapat pula tantangan ketidakharmonisan regulasi antar instansi pusat dan daerah yang dapat menciptakan kebingungan administratif (Nalien, 2022). Kendala lain yang ditemukan adalah kurang lengkapnya data pendukung inventarisasi aset, meliputi dokumen administratif, bukti kepemilikan, dan rincian mutasi aset. Ini menyulitkan penyusunan laporan yang akurat serta memengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, terutama untuk aset tanah yang memerlukan dokumen kepemilikan sah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berupaya meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan BMD melalui e-BMD, meskipun masih menghadapi kendala operasional seperti kurangnya pemahaman teknis operator, keterbatasan jaringan internet, dan pembaruan data yang tidak berkala.

## **IV. KESIMPULAN**

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui aplikasi e-BMD di Kabupaten Bojonegoro dinilai cukup efektif dan perlu adanya upaya peningkatan lebih lanjut karena indikator yang telah efektif sama banyaknya dengan yang belum efektif. Adapun Indikator yang efektif adalah Pendaftaran dan pencatatan BMD serta Inventarisasi Fisik. Sedangkan yang belum efektif adalah Invenatrisasi Yuridis, Penyusunan dan Rekapitulasi Laporan. Faktor-faktor penghambat dalam penatausahaan BMD melalui e-BMD: a.) Proses rekonsiliasi aset antar-OPD yang belum lengkap karena keterbatasan SDM dan pemahaman aplikasi. b.) Data pendukung inventarisasi yang belum lengkap, seperti dokumen legalitas dan informasi lokasi aset. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan upaya perbaikan seperti mengajukan kostumisasi sistem ke Kemendagri dan menyelenggarakan pelatihan pengoperasian aplikasi e-BMD kepada para pengurus barang dan staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset di seluruh OPD serta rekonsiliasi internal untuk OPD terkait

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi saja.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ibu Elvira Mulya Nalien, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi juga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro serta seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan waktu, pikiran serta bantuan dalam skripsi ini



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1 ed.). Deepublish.
- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, & Diella Jauza. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64–74. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Kelima). Pustaka Pelajar.
- Damanik, E. B., Hayat, A., & Sayudi, A. (2022). Pengaruh Penatausahaan Aset dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Kabupaten Barito Utara. 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.26714/mki.12.1.2022.1-12>
- Halim, A. (2021). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Keempat). Salemba empat.
- Kraus, Sascha, Jones, Paul, Kailer, Norbert, Weinmann, Alexandra, Chaparro-Banegas, Nuria, & Roig-Tierno, Norat. (2021). Digital Transformation: An Overview of the Current State of the Art of Research. *SAGE Open*, 11(3), 21582440211047576. <https://doi.org/10.1177/21582440211047576>
- Martini, R., Dewanti Citra Arimbi, & Kartika Rachma Sari. (2023). Peran Penatausahaan Aset Tetap untuk Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 223–228. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.009>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. Media Sahabat Cendekia.
- Paulin, A. (2022). Twenty Years After the Hype: Is e-Government doomed? Findings from Slovenia. *International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA)*, 2((2)), 1–21. <https://doi.org/10.4018/ijpada.2015040101>
- Permatasari, A. D., & Hastuti, H. (2020). *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung*. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2131>
- Prabowo, H., Rowa, H., Madjid, U., & Johannes Ayu W. and Sinaga, O. (2021). Transformation of Licensing Governance in Facing the Industrial Revolution 4.0 at Bandung City. *Croatian International Relations Review*, 27(88), 223–237. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/777>
- Romarina, A., Sembiring, Y., Nalien, E. M., Yul, F., Marta, D., Ardieansyah, A., Zahrati, W., Ilham, R., & Asmungi, A. (2025). Edukasi Cinta dan Bangga Rupiah : Penguatan Literasi Keuangan dan Transformasi Digital UMKM. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7, 180–191. <https://doi.org/10.24036/abdi.v7i1.1082>
- Sa'diyah, N. (2024). *Manajemen Aset Publik dan Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Lintang Press.
- Silvi Fitria, Khaerul Umam, & Ai Siti Farida. (2022). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Bappelitbangda Kabupaten Bandung. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 826–844. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2853>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

- Sinurat, M., & Panjaitan, H. M. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah* (Agus Haidar (ed.); Cetakan Pe).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Utami, R. (2020). *Analisis Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap Dan Penerapannya Terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda-Bmd) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin* (Vol. 2507, Nomor February) [Universitas Tridinanti]. <http://repository.univ-tridinanti.ac.id/id/eprint/1603>
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Qi Dong, J., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Yulianty, R., & Fitrhatin, D. (2020). Kebijakan Politik Pemerintahan Bojonegoro dalam Mengelola Sumber Daya Alam Minyak Bumi. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(2), 140-153. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i2.2004>

